



PELINDUNGAN ANAK DI WILAYAH PESISIR INDONESIA

Mohammad Teja* dan Putu Ayu Dhana Reswari**

Abstrak

Anak-anak di wilayah pesisir menghadapi berbagai bentuk kerentanan akibat kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dan tekanan ekologis yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka. Tulisan ini menganalisis faktor penyebab permasalahan perlindungan anak di wilayah pesisir serta berbagai upaya strategis untuk menanganinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerentanan anak pesisir dipengaruhi oleh lemahnya literasi pengasuhan dan gizi keluarga, ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak stabil, serta belum optimalnya kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Upaya strategis yang diperlukan mencakup penguatan kapasitas keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan inklusif, serta adaptasi kebijakan terhadap risiko perubahan iklim. DPR RI melalui Komisi VIII diharapkan mendorong harmonisasi kebijakan, pengawasan program berbasis bukti, dan integrasi isu perlindungan anak pesisir dalam perencanaan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Kasus kurang gizi pada anak di Pulau Damer, Maluku Barat Daya, pada Oktober 2025 menjadi ironi di wilayah pesisir yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan rempah. Sekitar 40 persen dari 150 balita di daerah tersebut memiliki berat badan di bawah standar. Rendahnya pengetahuan gizi, keterbatasan akses pangan bergizi, lemahnya pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pola asuh turun-temurun memperparah kondisi tersebut (Aranditio, 2025). Fenomena ini menggambarkan ketimpangan antara potensi ekonomi dan ketercukupan layanan dasar.

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling memengaruhi. Berdasarkan data BPS (2025), dari 84.276 desa/kelurahan di Indonesia, sebanyak 12.968 (15,39 persen) berada di tepi laut. Artinya, satu dari tujuh desa di Indonesia memiliki keterkaitan geografis dan sosial dengan kawasan pesisir.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: teja@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: putu.reswari@dpr.go.id

Data BPS (2022) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 17,74 juta jiwa, dengan 3,9 juta jiwa tergolong miskin ekstrem (Nugraheni, 2023). Anak-anak di kawasan ini menghadapi risiko ganda berupa keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial, disertai kerentanan terhadap perubahan iklim, bencana, serta lemahnya perlindungan sosial institusional (Hamka et al., 2019). Tulisan ini menganalisis faktor penyebab masalah perlindungan anak di wilayah pesisir serta berbagai upaya strategis untuk mengatasinya.

Permasalahan Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak di Wilayah Pesisir

Anak-anak di wilayah pesisir menghadapi tantangan kompleks dalam pemenuhan hak-hak dasar, terutama hak atas pendidikan, pelindungan dari eksploitasi, dan hak tumbuh kembang yang optimal. Berdasarkan temuan lapangan dan hasil penelitian empiris, permasalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat isu utama.

Pertama, keterbatasan akses pendidikan menjadi persoalan mendasar. Penelitian di Desa Eretan Wetan, Indramayu, menunjukkan bahwa kemiskinan keluarga, jarak sekolah yang jauh, serta budaya yang memprioritaskan pekerjaan sebagai nelayan menjadi hambatan utama bagi anak memperoleh pendidikan layak (Alfaza, 2025). Minimnya fasilitas pendukung seperti alat tulis, bahan bacaan, dan motivasi belajar memperburuk situasi (Akbar, 2023).

Kedua, lemahnya sistem pelindungan sosial dan hukum berkontribusi terhadap tingginya pelanggaran hak anak. KPAI (2021) mencatat 5.953 kasus pelanggaran hak anak dengan angka tertinggi di komunitas padat pesisir yang rentan pekerja anak (Widianingsih et al., 2022). Penurunan pendapatan akibat perubahan iklim turut memicu tekanan psikososial dan kekerasan domestik (Fadilla, 2023).

Ketiga, meningkatnya pernikahan dini dan pekerja anak menunjukkan rendahnya literasi pengasuhan di tingkat keluarga. Banyak pernikahan tidak tercatat resmi, menyebabkan data nasional tidak mencerminkan kondisi riil (DW Indonesia, 2025).

Keempat, gizi buruk (stunting) menjadi ancaman serius bagi anak pesisir. Meskipun sumber protein laut melimpah, pola makan tidak seimbang dan kurangnya edukasi nutrisi meningkatkan risiko gizi kurang (Najah et al., 2024; Sari & Riyanti, 2023).

Keempat isu tersebut menunjukkan bahwa kerentanan anak di wilayah pesisir tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, melainkan juga oleh kompleksitas sosial, budaya, dan ekologis yang saling terkait. Oleh karena itu, kebijakan pelindungan anak di wilayah pesisir harus bersifat terpadu, lintas sektor, dan berbasis komunitas.

Penyebab Permasalahan Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak di Wilayah Pesisir

Akar permasalahan pelindungan anak berawal dari unit terkecil, yaitu keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, menyebabkan minimnya pengetahuan tentang gizi dan pola asuh. Meskipun sumber protein laut melimpah, pola makan yang tidak sesuai usia serta rendahnya konsumsi protein hewani masih lazim terjadi (Kusuma et al., 2025; Sari & Riyanti, 2023; Najah et al., 2024). Jumlah anggota keluarga yang besar membatasi perhatian dan sumber daya pengasuhan, meningkatkan risiko stunting dan gizi buruk. Literasi gizi dan pola asuh menjadi fondasi utama bagi penguatan pelindungan anak pesisir.

Kelemahan di tingkat keluarga memicu kerentanan sosial di komunitas pesisir. Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, pekerja anak, dan pernikahan usia dini akibat lemahnya kontrol sosial dan pengawasan institusional (Pesisir Selatan, 2025). Tekanan ekonomi, terbatasnya pendidikan bagi perempuan muda, serta budaya patriarki mendorong praktik pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara struktur keluarga, norma budaya, dan lemahnya sistem pelindungan sosial.

Keterbatasan ekonomi memperburuk situasi tersebut. Sebagian besar masyarakat pesisir bergantung pada sektor perikanan dan perdagangan kecil dengan pendapatan tidak stabil, sementara akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih minim (Hamka et al., 2019). Anak-anak pun sering terlibat dalam pekerjaan membantu keluarga, memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Di sisi lain, perubahan ekologis seperti abrasi, pencemaran, dan cuaca ekstrem meningkatkan risiko kesehatan, menurunkan ketahanan pangan, dan memperlemah daya tahan sosial-ekonomi keluarga nelayan (Purnomo et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan pelindungan anak perlu mengintegrasikan dimensi ekologis sebagai bagian dari strategi pembangunan pesisir berkelanjutan.

Menjawab kompleksitas tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program di empat bidang utama. Pertama, program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan KREASI untuk memperluas akses pendidikan ramah anak dan meningkatkan kapasitas guru di sekolah pesisir (Kementerian PPPA, 2025). Kedua, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk membentuk kader lokal sebagai agen pengawasan dan pelapor kekerasan (Save the Children Indonesia, 2025). Ketiga, pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan melalui pelatihan vokasional dan diversifikasi usaha untuk mengurangi praktik pekerja anak serta pernikahan dini. Keempat, program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) yang mengintegrasikan edukasi lingkungan dan gizi anak untuk meningkatkan kesehatan keluarga pesisir (KKP, 2025).

Namun berbagai inisiatif tersebut masih terkendala koordinasi lintas sektor, pendanaan, dan adaptasi lokal. Ke depan, diperlukan sistem data terpadu anak pesisir, integrasi isu perlindungan anak ke dalam RPJMN dan RZWP3K, serta partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan berbasis kearifan lokal agar perlindungan anak pesisir benar-benar berkelanjutan.

Penutup

Kasus pelanggaran hak anak di wilayah pesisir masih tinggi akibat kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta kerentanan ekologis. Kondisi ini memperlemah kemampuan keluarga memenuhi hak dasar anak dan meningkatkan risiko kekerasan, eksploitasi, serta putus sekolah. Diperlukan kebijakan terpadu yang menggabungkan penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan layanan ramah anak berbasis konteks sosial-ekologis pesisir.

Upaya strategis mencakup penguatan program KLA, PATBM, dan Laut Sebasah dengan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. DPR RI melalui Komisi VIII diharapkan dapat mendorong regulasi adaptif, pengawasan anggaran, dan advokasi kebijakan berbasis bukti agar perlindungan anak pesisir lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Referensi

- Akbar, L. P. (2023). *Eksistensi Sekolah Pesisir Juang dalam memenuhi hak pendidikan anak pesisir* [Skripsi, Universitas Mataram].
- Alfaza, A. R. (2025). Pendidikan anak nelayan di Desa Eretan Wetan: Pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi tantangan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. *Concept*, 4(1), 1–13.
- Aranditio, S. (2025, Maret 3). Kesenjangan nutrisi: Anak kurang gizi di pulau kaya rempah dan ikan. *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/artikel/anak-kurang-gizi-di-pulau-kaya-rempah-dan-ikan>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). *Jumlah desa/kelurahan menurut provinsi dan letak geografi, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UVZSa1drWjZObmgxWkVnMGJ6WXIjVzVHTWtwbmR6MDkjMw%3D%3D/jumlah-desa-sup-1-sup--kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2024.html?year=2024>
- DW Indonesia. (2025, Juli 22). Mengapa pernikahan dini marak terjadi di wilayah pesisir? *DW.com*. <https://www.dw.com/id/pernikahan-dini-di-pesisir/a-72610815>
- Fadilla, M. I. V. (2023, September 12). Perubahan iklim picu fenomena pernikahan anak di pesisir utara Jakarta. *Mongabay Indonesia*. <https://mongabay.co.id/2023/09/12/perubahan-iklim-picu-fenomena-pernikahan-anak-di-pesisir-utara-jakarta>
- Hamka, H., Cokorda, B. A. Y., & Jupriyono, M. P. (2019). Pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mengubah cara pandang pembangunan ekonomi kelautan. *Jurnal Planologi STIA LAN Jakarta*. <http://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/137/99>

- Indonesia Kreasi. (2025, Mei 14). Perkuat perlindungan anak, PATBM mulai diaktivasi di Pesisir Barat. *Indonesia Kreasi*. <https://indonesia-kreasi.or.id>
- Jatmiko, B. P. (2024, Januari 28). 5 peluang bisnis untuk masyarakat pesisir. *Kompas.com*. <https://umkm.kompas.com/read/2024/01/28/123000283/5-peluang-bisnis-untuk-masyarakat-pesisir?page=all>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025, Oktober 6). KKP edukasi laut sehat bebas sampah ke ratusan anak sekolah di Jakarta Utara. *KKP News*. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-edukasi-laut-sehat-bebas-sampah-ke-ratusan-anak-sekolah-di-jakarta-utara-oZzj.html>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). Komitmen Pesisir Selatan dalam Kabupaten Layak Anak tahun 2025. *Portal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan*. <https://pessel.pesisirselatankab.go.id>
- Kusuma, E., Widiyanto, E. P., Astuti, A., Sugiono, A. T. P., & Fitriyah, A. (2025). Faktor sosial dan perilaku sebagai prediktor stunting pada balita di wilayah pesisir Kota Pasuruan. *The Indonesian Journal of Health Science*, 17(1), 21–30. <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/TIJHS/article/view/3284>
- Najah, S. S., Noveyani, A. E., Simanjuntak, T. D., Wati, D. M., & Ridzkyanto, R. P. (2024). Feeding patterns and stunting incidence among toddlers in coastal community of Gresik. *Epidemiology Journal*, 12(1), 35–45.
- Purnomo, H., Fadli, Z., & Nurlukman, T. (2024). Penguatan perlindungan sosial masyarakat pesisir di era perubahan iklim. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 25(2), 152–170. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=jiks>
- Sari, N. F., & Riyanti, D. (2023). The factors affecting stunting on toddlers in coastal areas of Pasuruan. *Indonesian Journal of Nutrition and Health*, 10(3), 78–85. <https://aisyah.journalpress.id/index.php/jika/article/view/7314>
- Save the Children Indonesia. (2025, Juni 18). Kolaborasi KREASI, Kemenag & DPPPAB: 52 madrasah di Pesisir Barat bentuk TPPK. *DPPPAB Pesisir Barat*. <https://dpppakb.pesisirbaratkab.go.id>
- Widianingsih, Y., Irawati, A., Fathun, L. M., Satino, & Mulyantini, S. (2022). Pemberdayaan kelompok ibu-ibu rumah tangga dalam upaya perlindungan hak-hak anak di wilayah pesisir pantai Desa Pabean Udik, Indramayu. *Jurnal Media Abdimas*, 1(3), 152–157.

